

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi 1998 merupakan momentum transformasi krusial yang mengubah arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia secara fundamental. Untuk keluar dari tekanan krisis, pemerintah melakukan reformasi besar dengan mengalihkan sebagian kewenangan dari pusat kepada daerah melalui kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur urusan dan sumber daya mereka dengan lebih otonom, yang pada gilirannya mempercepat kemajuan pembangunan di setiap daerah. Dengan otonomi yang lebih luas, pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih cepat dan efektif, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian tentang reformasi politik dan otonomi daerah pasca-1998 (Mega Christia & Ispriyarso, 2019)

Sebagai pedoman hukum utama, pemerintah melalui UU No.32/2004 menetapkan kerangka desentralisasi yang baru, menggantikan UU No.22/1999. Ketentuan tersebut mengonstruksikan payung hukum yang utuh bagi pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan hak dan kewajibannya guna mendukung keberhasilan implementasi otonomi di tingkat lokal. (UU No. 32/2004). Dengan desentralisasi penuh, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pembangunan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penyerahan wewenang ini memberi daerah fleksibilitas untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya lokal secara optimal, sehingga kebijakan otonomi diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan keseimbangan

kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan (Gladisya, 2022), yang menegaskan bahwa UU No. 32/2004 Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan, dan mandat pemerintah wilayah dalam mengakomodasi serta menyelenggarakan berbagai aspirasi publik di tingkat lokal, sehingga menjadi basis yang krusial untuk pencapaian desentralisasi yang berhasil.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun sejak diimplementasikan secara resmi pada tahun 2001. Selama periode ini, pemerintah daerah telah diberikan kekuasaan yang lebih signifikan dalam mengatur keuangan, layanan publik, serta pembangunan ekonomi di tingkat regional. Menurut (Hamidi et al., n.d.) dalam buku Dua Dekade Desentralisasi Fiskal di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal selama lebih dari dua dekade telah membawa perubahan penting dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat terutama dalam peningkatan transfer fiskal, penguatan kapasitas daerah, serta perpanjangan kewenangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga menghadapi berbagai masalah, seperti ketidakmerataan kapasitas fiskal antar wilayah, ketergantungan tinggi pada dana dari pemerintah pusat, serta kualitas pengeluaran daerah yang belum optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Situasi ini menunjukkan bahwa suksesnya otonomi daerah tidak hanya bergantung pada sejauh mana kewenangan yang diberikan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya fiskal secara baik, efisien, dan fokus pada pembangunan ekonomi dalam jangka Panjang

Kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah menjadi prasyarat fundamental bagi penguatan ekonomi kewilayahan, sebab memberikan kesempatan bagi sektor-sektor lokal untuk tumbuh. Namun, suksesnya kebijakan ini sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, terutama pada aspek pengelolaan sumber daya finansial serta perancangan kerangka APBD yang sesuai dengan fungsi dan prioritas masing-masing. Pada hakikatnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah perlu mempertimbangkan tiga aspek utama: pertama, peningkatan mutu layanan publik dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal; kedua, pengelolaan efisien atas sumber daya lokal agar potensi daerah dapat dimaksimalkan; dan ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah, sebagai bentuk partisipatif dalam tata kelola anggaran (Shofiul, 2022)

Dalam kerangka otonomi daerah, terdapat dua faktor krusial yang menjadi kunci agar sistem otonomi bisa lebih optimal dibanding versi sebelumnya. Pertama, otoritas setempat diberi hak untuk mendanai kebutuhan mereka sendiri dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber asli daerah (PAD), yang pada gilirannya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kedua, dari sisi pengeluaran, sangat penting agar belanja daerah dikelola secara transparan dan akuntabel, karena hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi anggaran. Kombinasi kedua elemen ini yakni reformasi pembiayaan (*financing reform*) menjadi pondasi penting bagi efektivitas desentralisasi fiskal. Perubahan seperti ini juga telah dieksplorasi dalam tulisan-tulisan ilmiah sebagai faktor yang meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah (Wahyudi, 2023).

Berdasarkan UU No. 17/2003 berisi tentang Keuangan Negara dan pengelolaan keuangan publik merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah pusat memegang tanggung jawab utama, namun Presiden memberikan mandat kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengatur kekayaan finansial dan mandat representatif daerah dalam manajemen kekayaan yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari instrumen finansial publik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepala daerah juga memiliki kewenangan untuk menyediakan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Selain itu, pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sambil tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Salah satu komponen utama dalam struktur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan manifestasi dari kemandirian ekonomi daerah melalui akumulasi pendapatan berbasis potensi lokal yang disahkan dalam regulasi kewilayahan sesuai prinsip hukum yang berlaku (Yakub, 2022). Hal ini sejalan dengan (Astika, 2022.), yang menegaskan bahwa PAD menjadi indikator kemandirian fiskal daerah sekaligus elemen strategis dalam memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tingkat regional.

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sangat mendukung kinerja keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya lebih optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, kenaikan PAD tidak berarti sepenuhnya meniadakan peran dana dari pemerintah pusat. Transfer dari pusat tetap penting sebagai kompensasi terhadap ketidakseimbangan fiskal antar daerah yang muncul karena perbedaan kapasitas sumber daya. Berdasarkan UU No. 1/2022 tentang Keterkaitan Keuangan Antara Pusat dan

Daerah, transfer dari pusat meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Melalui berbagai komponen pendanaan ini, pemerintah daerah memperoleh dukungan fiskal tambahan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian(Sunarya Sulaeman, 2019) memperkuat argumen tersebut. Penelitian mereka mengindikasikan bahwa PAD, DAU, dan DBH berperan penting dalam memperbaiki kemandirian fiskal serta hasil keuangan daerah, yang berarti bahwa kombinasi antara pendapatan asli dan transfer pusat tetap menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang sehat. Sejalan dengan itu, Dana perimbangan terutama DBH, DAU, dan DAK berperan besar dalam memperbaiki kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki PAD relatif rendah. Kedua penelitian tersebut menyoroti bahwa optimalisasi otonomi fiskal tidak hanya berpijak pada daya tarik fiskal lokal dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga pada pemanfaatan yang maksimal dari transfer pemerintah pusat untuk mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan publik.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan setelah reformasi telah secara signifikan mengubah dinamika hubungan keuangan vertikal antara otoritas nasional dan subnasional. Kebijakan ini memberikan lebih banyak kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya fiskal demi meningkatkan kualitas layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Menempati kedudukan strategis sebagai salah satu poros ekonomi terbesar di Nusantara, Provinsi Jawa Timur mencerminkan dinamika aktivitas komersial yang masif di mana desentralisasi fiskal memiliki peran yang krusial

dalam memperbaiki kinerja keuangan serta kemandirian daerah, mengingat beragamnya potensi ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota. Tetapi ketimpangan antara daerah-daerah di Jawa Timur terjadi akibat perbedaan kapasitas fiskal regional, struktur ekonomi, dan kualitas pengeluaran pemerintah, sehingga efektivitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen keuangan masing-masing kabupaten/kota.

Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, penelitian mengenai kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masih banyak dilakukan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota secara agregat, padahal Jawa Timur memiliki struktur wilayah administratif yang terbagi ke dalam beberapa Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dengan karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal yang berbeda-beda. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur, karena wilayah ini memiliki heterogenitas kapasitas fiskal yang tinggi, struktur ekonomi yang relatif seimbang antara sektor pertanian, industri pengolahan skala menengah, perdagangan, dan jasa, serta peran strategis sebagai wilayah penyangga dan penghubung pertumbuhan ekonomi regional. Heterogenitas kapasitas fiskal yang tinggi tersebut tercermin dari adanya perbedaan kemampuan keuangan yang signifikan antar kabupaten/kota dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membiayai belanja pembangunan secara mandiri, yang dipengaruhi oleh variasi struktur ekonomi, potensi sumber daya lokal, serta kemampuan pengelolaan fiskal masing-masing daerah, sehingga menimbulkan ketimpangan horizontal dalam kapasitas fiskal daerah (horizontal fiscal imbalance). Studi oleh Kementerian Keuangan melalui Jurnal (Herdiyana, 2019) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh komposisi PAD dan dana bagi hasil serta berbeda

nyata antar wilayah administratif, yang berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal (Herdiyana, 2019). Selain itu, penelitian empiris oleh Universitas Negeri Malang menemukan bahwa perbedaan kapasitas fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah dengan heterogenitas fiskal yang tinggi menjadi relevan untuk dianalisis guna melihat variasi respons kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Salma Nazikha & Rahmawati, 2021). Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadikan Bakorwil II Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang strategis dan representatif untuk mengkaji hubungan antara rasio kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam era desentralisasi fiskal.

Karakteristik area Bakorwil II di Provinsi Jawa Timur, mencakup delapan wilayah administratif terdiri dari Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, Mojokerto, Gresik, Nganjuk, serta Kota Mojokerto, membuat wilayah ini sangat peka terhadap mutu pengelolaan keuangan lokal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemandirian fiskal yang belum seimbang di antara daerah-daerah tersebut; pertumbuhan ekonomi daerah tidak muncul secara otomatis, melainkan bergantung pada efektivitas perencanaan anggaran, efisiensi belanja, dan ketepatan alokasi belanja modal dalam APBD. Hal ini karena beberapa kabupaten/kota mampu menghasilkan PAD lebih tinggi dan mengelola belanja untuk pembangunan produktif, sedangkan daerah lain masih bergantung pada dana transfer pusat, sehingga tekanan fiskal (*fiscal stress*) dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Studi empiris di berbagai lokasi menunjukkan bahwa tekanan fiskal dan kapabilitas manajerial fiskal di tingkat subnasional memiliki signifikansi yang menentukan bagi progres

pembangunan kolektif maupun pertumbuhan ekonomi makro, menunjukkan bahwa opsi pembiayaan yang efisien dan responsif terhadap tekanan anggaran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar besaran anggaran belanja saja. Misalnya, studi di Jawa Timur menemukan bahwa faktor komponen PAD, dana perimbangan dan pengeluaran memiliki dampak pada tingkat tekanan fiskal yang kemudian berimbas pada pengelolaan keuangan daerah dan output ekonomi, sehingga daerah dengan manajemen fiskal yang lebih baik cenderung menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih tinggi(Suryani, 2020).

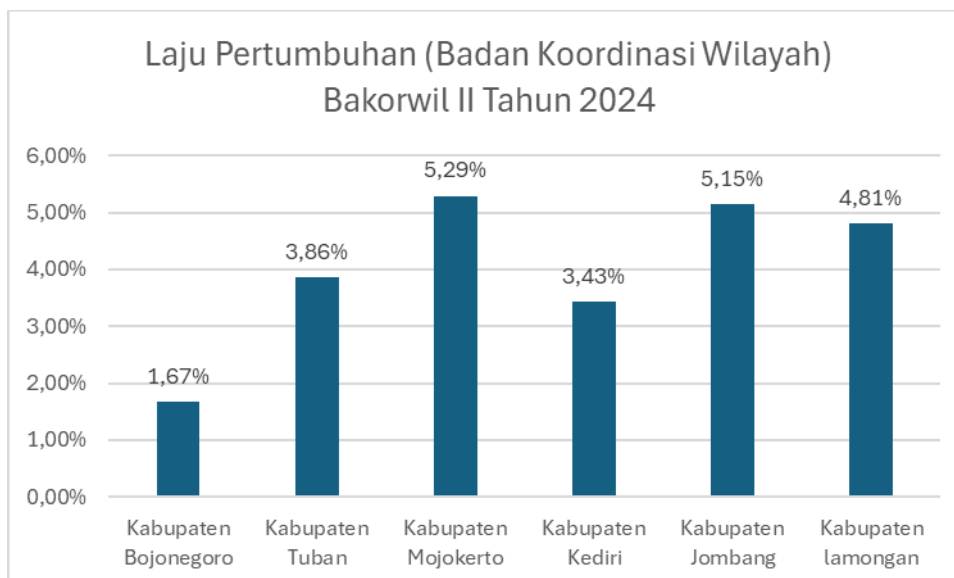
Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur memiliki struktur ekonomi yang beragam dengan sumbangan sektor industri/manufaktur yang kuat di sebagian wilayah utamanya. Misalnya, di Kabupaten Mojokerto, sektor manufaktur teridentifikasi sebagai sektor utama yang mengukuhkan posisinya sebagai kontributor dominan dalam agregat output wilayah (PDRB) dan mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan output industri yang kompetitif, sehingga menjadi basis penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Penelitian (Irmansyah, 2024; Nazikha & Rahmawati, 2021) menunjukkan bahwa sektor manufaktur merupakan basis dan sektor kompetitif utama di Mojokerto yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan daerah karena perannya dalam mendorong ekspansi ekonomi dan PAD melalui kegiatan produksi dan investasi lokal(Salma Nazikha & Rahmawati, 2021).

Selain itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan juga memiliki potensi sektor ekonomi unggulan, meskipun sektor unggulannya berbeda-beda menurut karakteristik lokal. Studi yang menelaah

potensi sektoral di Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan menunjukkan bahwa sektor unggulan bervariasi antar kabupaten, seperti sektor industri primer dan base sectors lainnya yang memiliki nilai tambah bagi perekonomian setempat dan berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih luas jika didukung kebijakan fiskal dan investasi yang tepat. (Yunila, 2022) Di Lamongan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dikenal sebagai penopang utama PDRB yang dapat ditingkatkan untuk mendukung kemajuan ekonomi daerah apabila dikaitkan dengan rencana pengembangan ekonomi lokal yang komprehensif (Raihan & Priyono, 2024).

Wilayah lain seperti Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Nganjuk juga menunjukkan dinamika ekonomi yang khas: sektor perdagangan, jasa, dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang penting dalam upaya menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Data menunjukkan bahwa banyaknya tenaga kerja di UMKM di Gresik dan Jombang sangat signifikan, mencerminkan kontribusi sektor kecil dan menengah dalam menyerap tenaga kerja serta memperluas fondasi ekonomi lokal yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD melalui retribusi dan pajak daerah setempat (Anugerah & Nuraini, 2021). Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan fiskal daerah yang kontekstual dan fleksibel untuk mendukung pengembangan sektor unggulan yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota dalam Bakorwil II, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif dan merata. (Anugerah & Nuraini, 2021)

**Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah-Wilayah Bakorwil II
Jawa Timur**

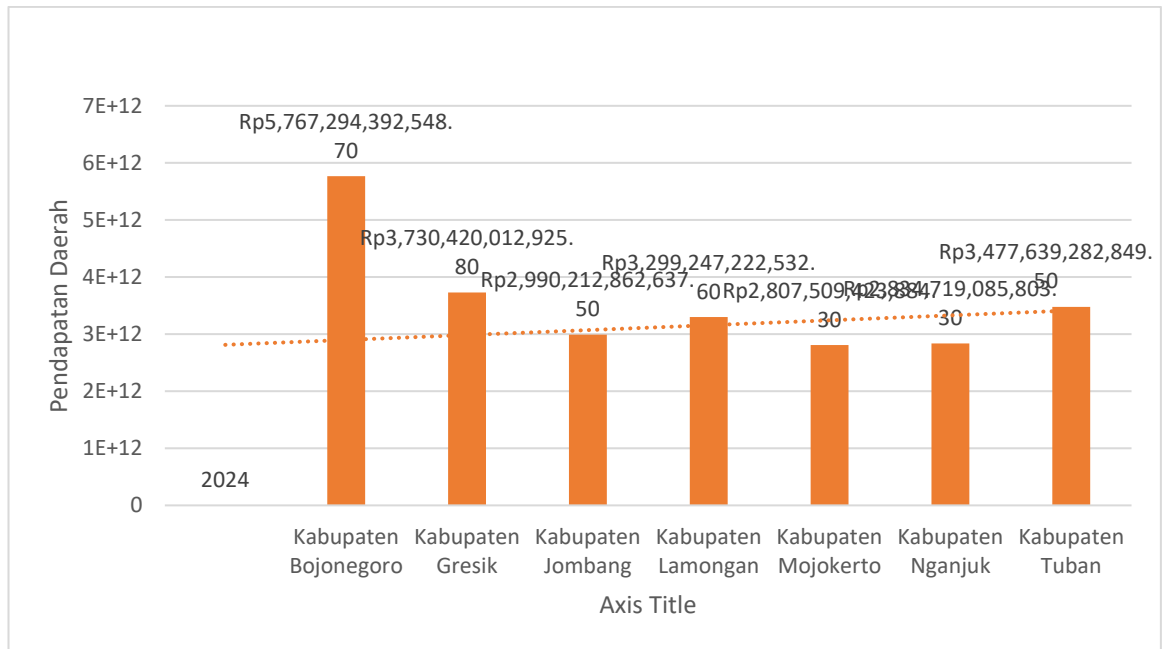


Sumber : BPS Wilayah-Wilayah Bakorwil II 2015-2025

Pada Gambar 1.1 ditunjukkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang memperlihatkan adanya perbedaan kinerja pertumbuhan antar kabupaten sebagai cerminan variasi struktur ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Kabupaten Mojokerto mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 5,29%, diikuti oleh Kabupaten Jombang (5,15%) dan Kabupaten Lamongan (4,81%), yang mengindikasikan kuatnya peran sektor industri pengolahan, perdagangan, serta aktivitas UMKM dalam mendorong ekspansi ekonomi daerah. Kabupaten Tuban dan Kabupaten Kediri masing-masing tumbuh sebesar 3,86% dan 3,43%, mencerminkan pertumbuhan yang relatif moderat dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dan industri berbasis sumber daya. Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro menunjukkan pertumbuhan paling rendah sebesar 1,67%, yang dapat dikaitkan dengan ketergantungan pada sektor ekstraktif yang cenderung fluktuatif dan kurang menciptakan efek pengganda jangka pendek. Pola ini menegaskan bahwa wilayah Bakorwil II memiliki dinamika pertumbuhan yang tidak seragam, di mana daerah dengan basis industri dan aktivitas ekonomi bernilai tambah cenderung menunjukkan pertumbuhan lebih terakselerasi, yang berbanding

terbalik dengan kawasan yang masih bertumpu pada sektor primer menghadapi keterbatasan dalam akselerasi pertumbuhan. Kondisi tersebut memperkuat relevansi Bakorwil II sebagai wilayah kajian untuk menganalisis hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi

Gambar 1.2. Pendapatan Daerah Wilayah-Wilayah Bakorwil II

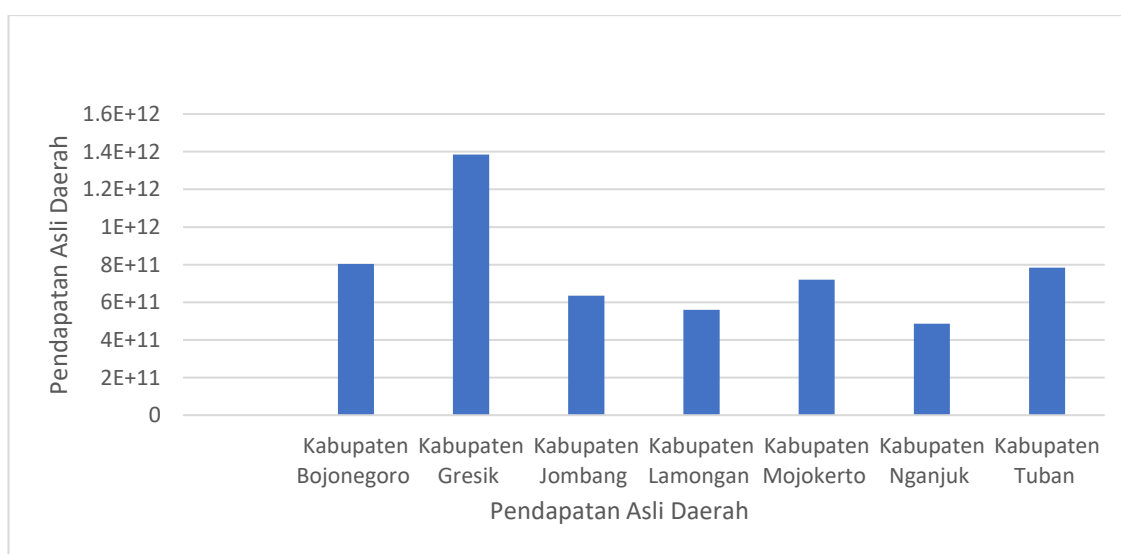


Sumber : BPS Wilayah-Wilayah Bakorwil II 2015-2025

Berdasarkan data pendapatan daerah tahun terakhir yang akan diteliti, terlihat adanya perbedaan kapasitas fiskal yang cukup signifikan antar kabupaten di wilayah Bakorwil II Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro mencatat pendapatan daerah tertinggi sebesar Rp5,77 triliun, yang mengindikasikan kuatnya basis penerimaan daerah, terutama dari sektor sumber daya alam dan aktivitas ekonomi strategis lainnya. Sementara itu, kabupaten lain seperti Gresik, Tuban, dan Lamongan juga menunjukkan pendapatan relatif tinggi yang mencerminkan peran sektor industri, perdagangan, dan logistik dalam menopang keuangan daerah. Di sisi lain, Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Nganjuk memiliki pendapatan

daerah yang lebih rendah, yang mengindikasikan keterbatasan ruang Fiskal dalam mendanai pembangunan dan layanan publik secara mandiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal di berbagai daerah masih belum seragam, sehingga penting untuk diteliti lebih dalam berkaitan dengan kemandirian fiskal, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Gambar 1.3. Pendapatan Asli Daerah Wilayah Bakorwil II

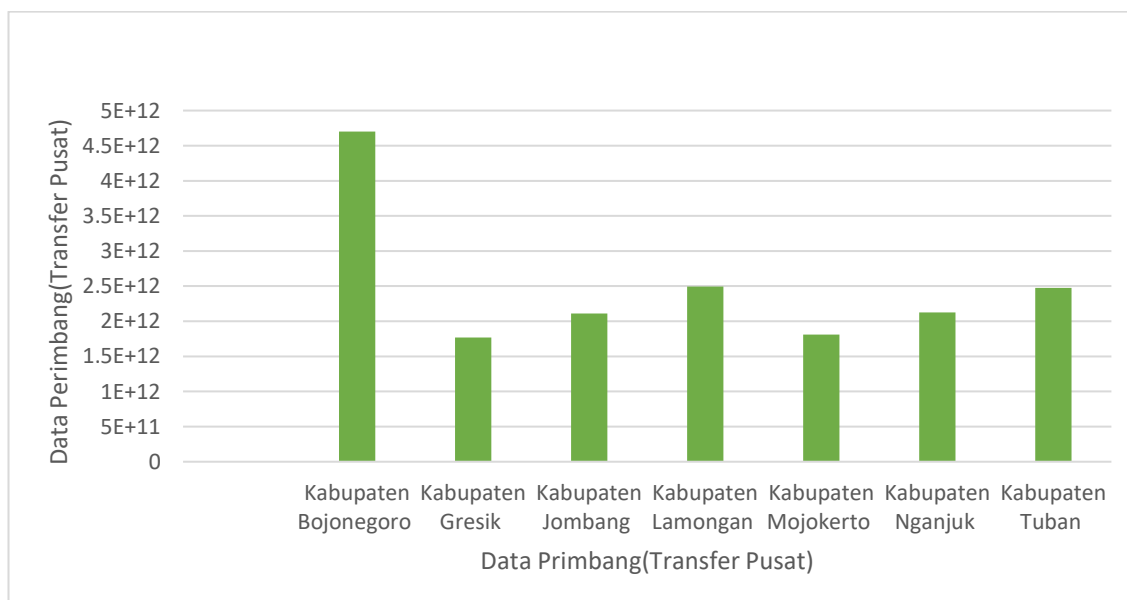


Sumber : BPS Wilayah-Wilayah Bakorwil II 2015-2025

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur menunjukkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Kabupaten Gresik mencatat PAD tertinggi sebesar Rp1,38 triliun, mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang kuat. Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Mojokerto berada pada kategori menengah dengan PAD di atas Rp700 miliar, menunjukkan potensi ekonomi yang cukup berkembang. Sementara itu, Kabupaten Jombang dan Lamongan memiliki PAD di bawah Rp650 miliar, dan Kabupaten Nganjuk menjadi daerah dengan PAD terendah sebesar Rp486,21 miliar. Perbedaan PAD ini mengindikasikan ketimpangan kinerja keuangan daerah yang

berpotensi memengaruhi kemampuan masing-masing wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi fiskal.

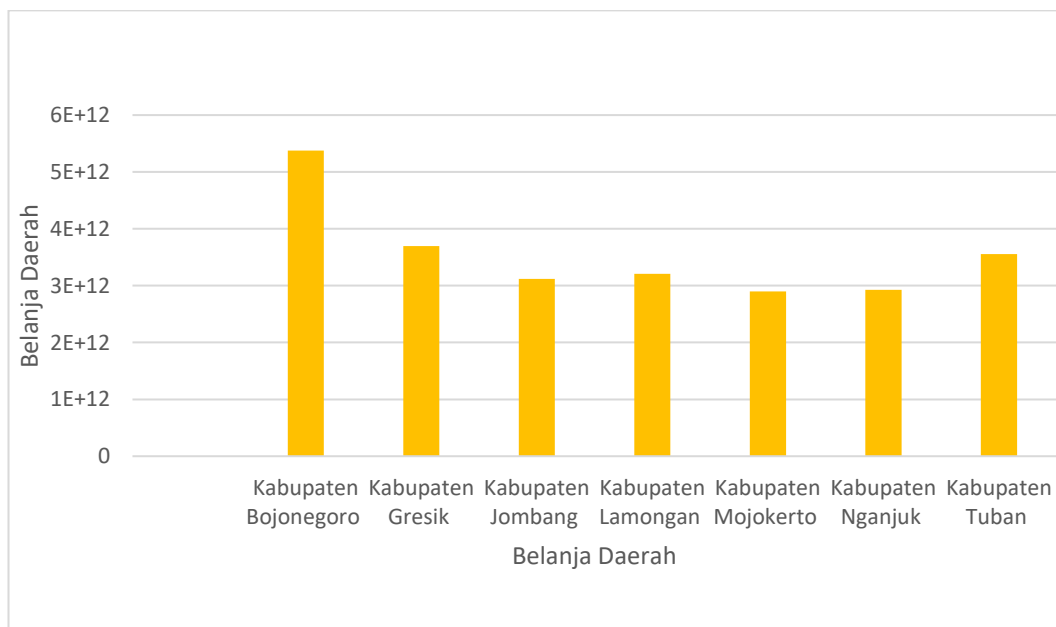
Gambar 1.4. Dana Perimbang (Transfer Pusat) Wilayah Bakorwil II



Sumber : BPS Wilayah-Wilayah Bakorwil II 2015-2025

Pada grafik transfer pusat (Dana Perimbangan) diatas menunjukkan ketergantungan fiskal yang berbeda-beda antar kabupaten di wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro menerima transfer pusat paling besar, yaitu sekitar Rp4,70 triliun, jauh di atas daerah lain. Sementara itu, Kabupaten Lamongan dan Tuban masing-masing menerima sekitar Rp2,50 triliun dan Rp2,48 triliun, disusul Kabupaten Nganjuk sebesar Rp2,13 triliun, Kabupaten Jombang sekitar Rp2,11 triliun, Kabupaten Mojokerto Rp1,81 triliun, dan Kabupaten Gresik sebagai penerima terendah dengan sekitar Rp1,77 triliun.

Gambar 1.5. Belanja Daerah Wilayah Bakorwil II



Sumber : BPS Wilayah-Wilayah Bakorwil II 2015-2025

Belanja daerah tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan kapasitas pengeluaran pemerintah daerah di wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro memiliki belanja daerah paling besar, yakni sekitar Rp5,4 triliun, disusul Kabupaten Gresik sebesar Rp3,7 triliun dan Kabupaten Tuban sekitar Rp3,5 triliun. Sementara itu, Kabupaten Lamongan dan Jombang masing-masing mencatat belanja sekitar Rp3,2 triliun dan Rp3,1 triliun, sedangkan Kabupaten Mojokerto dan Nganjuk berada pada tingkat belanja relatif lebih rendah, masing-masing sekitar Rp2,9 triliun. Perbedaan nominal belanja daerah ini mencerminkan variasi kemampuan fiskal dan prioritas kebijakan antar daerah. Kondisi tersebut penting dianalisis lebih lanjut karena besarnya belanja daerah belum tentu secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan sangat bergantung pada efektivitas dan pengelolaannya di era desentralisasi fiskal.

Fenomena pengelolaan keuangan daerah wilayah kerja Bakorwil II yang meliputi sebaran daerah dari Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang,

Mojokerto, Gresik, dan Nganjuk menunjukkan perbedaan karakteristik fiskal dan struktur ekonomi yang signifikan antar kabupaten. Setiap daerah memiliki basis ekonomi yang berbedamulai dari kekuatan sektor industri dan manufaktur di Gresik, Lamongan, maupun Mojokerto, hingga dominasi sektor pertanian dan UMKM di Nganjuk, Jombang, dan Tuban, dan fungsi sektor energi di Bojonegoro yang berdampak pada kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan asli daerah (PAD). Variasi ini menjadikan perbandingan kinerja pengelolaan keuangan daerah penting untuk memahami bagaimana kapasitas fiskal dan struktur ekonomi berperan dalam menentukan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam era desentralisasi fiskal, ketidakseimbangan karakteristik fiskal dan ekonomi antar kabupaten di Bakorwil II berpotensi memengaruhi kemampuan masing-masing daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan struktur ekonomi berbasis industri dan jasa, seperti Gresik dan Lamongan, memiliki peluang lebih besar dalam mengoptimalkan eskalasi kapasitas fiskal internal melalui instrumen perpajakan serta retribusi jasa daerah. Sebaliknya, kabupaten dengan basis ekonomi agraris dan UMKM seperti Nganjuk, Jombang, dan Tuban perlu mengoptimalkan efektivitas pengelolaan anggaran serta kebijakan pro-investasi untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Dengan demikian, melakukan perbandingan terhadap rasio-rasio kinerja keuangan daerah seperti rasio kemandirian fiskal, efektivitas, dan aktivitas belanja sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana perbedaan dalam struktur ekonomi memengaruhi pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja ekonomi regional sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Sebagai gambaran, studi yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pendapatan lokal dan dana alokasi memiliki pengaruh yang baik terhadap perkembangan ekonomi, meskipun pengeluaran untuk investasi bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. (Shofiul, 2022). Kajian lain menegaskan bahwa peningkatan PAD memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kinerja ekonomi daerah (Tajuddin & Kessi, 2025). Penelitian tentang daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa rasio keuangan yang meliputi kemandirian serta efektivitas, memberikan kontribusi yang berarti bagi kapasitas fiskal dan peningkatan PAD (Marsudi, 2019). Temuan yang serupa juga dicatat di Provinsi Jambi, di mana tanda-tanda desentralisasi fiskal, efektivitas, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi terkait dengan pembangunan manusia sebagai variabel yang mendukung (Adipura, 2022). Selain itu, efektivitas pencapaian PAD serta efisiensi dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran memungkinkan alokasi anggaran lebih optimal untuk pembangunan produktif (Yakub, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti yang merupakan mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Rasio Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur.” Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara empiris dalam memahami keterkaitan antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten, serta dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh rasio kemandirian kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh rasio efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh rasio aktivitas kinerja pengelolaan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan rasio kemandirian kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menganalisis hubungan rasio efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur
3. Untuk menganalisis hubungan rasio aktivitas kinerja pengelolaan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup investigasi ini dikonstruksikan untuk membedah pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur. Kerangka variabel independen mencakup Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Aktivitas, sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi diposisikan sebagai variabel dependen. Lokus penelitian menyasar delapan entitas administratif di bawah naungan Bakorwil II meliputi Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, Mojokerto, Gresik, Nganjuk, serta Kota Mojokerto dengan bentang waktu observasi selama periode 2015–2024.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada perluasan cakrawala teoretis mengenai bagaimana hubungan antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur. Hasilnya dapat menambah referensi bagi pembaca dalam pembahasan efektivitas APBD, rasio keuangan daerah, serta implementasi desentralisasi fiskal.

b) Manfaat Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya diskusi atau membantu pihak lain dalam penelitian mereka di masa mendatang. Selain itu, data yang dihasilkan turut berkontribusi pada gambaran yang akurat mengenai pendapatan, pengeluaran, dan kinerja keuangan di kedua wilayah tersebut.

c) Manfaat Kebijakan

Di era desentralisasi fiskal, output penelitian ini diproyeksikan bisa memotivasi pemerintah daerah di Wilayah-Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Timur untuk dapat memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat strategi fiskal dalam mendorong ekspansi output regional di tengah momentum desentralisasi fiskal.